

**PERNYATAAN SIKAP ALIANSI MASYARAKAT ADAT NUSANTARA (AMAN)
MUSYAWARAH WILAYAH AMAN KALSEL**

Pada hari ini Selasa tanggal 19 Januari 2016 telah dilaksanakan Musyawarah Wilayah II AMAN Kalimantan Selatan yang dihadiri oleh komunitas anggota AMAN Kalimantan Selatan yang bertempat di Balai Adat Malaris, Kecamatan Loksado, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Propinsi Kalimantan Selatan.

Selama berdirinya AMAN Kalimantan Selatan sampai sekarang masih banyak persoalan yang terjadi di berbagai komunitas Masyarakat Adat di Kalimantan Selatan, dimana posisi Masyarakat Adat masih sebagai pihak yang dirugikan. Dengan mengatas namakan pembangunan dan peningkatan ekonomi daerah khususnya dan nasional secara umum. Dalam pengelolaan hutan, tambang, kebun, fakta yang masih terjadi antara lain :

- Perampasan lahan Masyarakat Adat.
- Tidak di akunya hak-hak Masyarakat Adat.
- Ancaman terhadap hilangnya wilayah kampung atau balai adat.
- Kebijakan atau tata peraturan yang masih tidak cukup ruang untuk pengakuan hak-hak Masyarakat Adat, baik secara ekonomi, sosial, politik, budaya, pendidikan dan hak-hak atas wilayah, serta masih tidak diakuinya kepercayaan asli Masyarakat Adat.
- Kasus konflik agraria semakin meningkat.
- Ketidakadilan dalam penegakan hukum di wilayah Masyarakat Adat.

Melihat kondisi-kondisi yang terjadi di atas, maka AMAN Kalimantan Selatan menyatakan sikap sebagai berikut :

1. Mendesak pemerintah dan DPR untuk mempercepat pembangunan di komunitas adat di Kalsel yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan Masyarakat Adat di Kalsel.
2. Mendesak pemerintah untuk tidak memberikan izin perpanjangan dan izin baru pada perkebunan, pertambangan dan HTI di wilayah Masyarakat Adat Kalsel.
3. Mendesak pemerintah untuk mengesahkan RUU Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat (PPHMA) dan pembuatan Perda-Perda dan Pergub yang berhubungan dengan Masyarakat Adat di Kalsel.
4. Mendesak pemerintah dan perusahaan untuk menghentikan penyerobotan lahan-lahan Masyarakat Adat.
5. Mendesak pemerintah untuk membentuk tim investigasi dan study terhadap perusahaan yang melakukan aktivitas pencemaran lingkungan di wilayah Masyarakat Adat Kalsel.
6. Mendesak pihak penegak hukum untuk segera membentuk divisi khusus yang menangani konflik Lingkungan Hidup, Sumber Daya Alam dan Agraria di Kalsel.
7. Mendesak pihak Polda Kalsel agar dalam menangani konflik di masyarakat, tidak dilakukan dengan cara kekerasan.

Demikian pernyataan sikap ini kami buat untuk diperhatikan dan segera ditindak lanjuti oleh semua pihak.

Ditetapkan pada tanggal 19 Januari 2016
Di Balai Adat Malaris
Kecamatan Loksado, Kabupaten Hulu Sungai Selatan